



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai alat kendali, penilaian kuantitatif kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan dalam perpektif yang lebih luas, berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Secara kuantitatif kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari frekwensi prosentase pada analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sebagaimana yang terbaca dalam uraian Laporan Kinerja ini.

Keberhasilan aplikasi kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut merupakan konsekuensi logis dari pada perencanaan strategi yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam upaya pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya faktorperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi.

Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tergambar secara tersirat dalam analisis pengukuran kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor dana, sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLPUS MANGGARANG, S.Fil**

Pembina TK. I a/b

NIP. 196809032000121004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpijak pada Visi, Misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memperhitungkan berbagai kemampuan terutama kemampuan keuangan, maka pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dari evaluasi penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021, menunjukkan bahwa dari beberapa kebijakan yang ditetapkan, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sudah menampakkan hasil yang nyata serta berdampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Manggarai ke depan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai selama tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran 1 Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 159,17% dengan kategori "Memuaskan" dan Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 5,67 % dengan kategori "kurang" dengan total rata-rata capaian kedua sasaran adalah 82,42 % dengan kategori 'baik'.

Kami menyadari bahwa ada hambatan-hambatan serta kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuatan Laporan Kinerja ini sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat yang berwenang demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLFUS B. MANGGARANG, S.Fil**  
Pembina Tk. III/b  
NIP. 196809032000121004

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

1. Dasar hukum berdirinya Organisasi  
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019, Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengimplementasikannya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Pasal 2 huruf e angka 5 “ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”.
2. Tugas Pokok dan fungsi  
Berdasarkan peraturan Bupati Manggarai nomor 52 Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
  - 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menyelenggarakan fungsi:
    - a. Merumuskan perencanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
  - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
  - e. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
  - f. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
  - g. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan melaksanakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang program anggaran dan mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;uangan;
  - b. Menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
  - c. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - d. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
  - g. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
  - h. Menyusun laporan keuangan; dan

- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
  - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
  - d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3.1 Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3.2 Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;

- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan
  - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 1.1 Subbidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri;
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 1.2 Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Organisasi Kemasyarakatan;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berkaitan dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 3. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
  - 6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 5.1 Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan dini dan kerja;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerja; dan
  - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

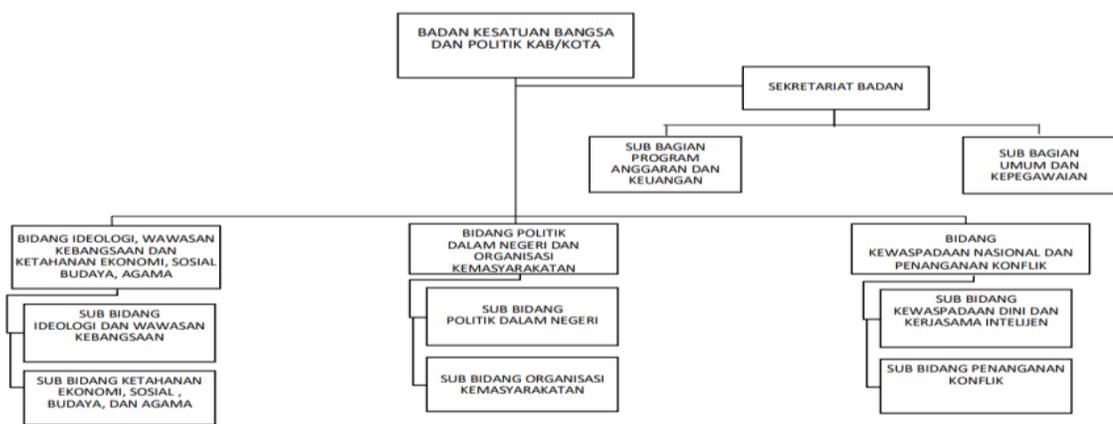
- 5.2 Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penanganan konflik;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan konflik;
  - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penanganan konflik;
  - melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan jumlah serta jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai**

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai**



2. Kondisi SDM Aparatur

Padatahun2021, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 20 orang. Berikut komposisi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021**

| No            | Jabatan           | Golongan |          |          |          |          | Jumlah    |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|               |                   | Non PNS  | I        | II       | III      | IV       |           |
| 1             | Kepala Badan      | -        | -        | -        | -        | 1        | 1         |
| 2             | Sekretaris        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1         |
| 3             | Kepala Bidang     | -        | -        | -        | -        | 2        | 2         |
| 4             | Kepala Sub Bidang | -        | -        | -        | 4        | -        | 4         |
| 5             | Kepala Sub Bagian | -        | -        | -        | 1        | 1        | 2         |
| 5             | Staf              | 1        | 1        | 4        | 3        | 1        | 10        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>20</b> |

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021**

| No            | Jabatan           | Kualifikasi Pendidikan |           |          |          |          |          | Jumlah    |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|               |                   | S2                     | S1        | D3       | SLTA     | SLTP     | SD       |           |
| 1             | Kepala Badan      | -                      | 1         | -        | -        | -        | -        | 1         |
| 2             | Sekretaris        | -                      | 1         | -        | -        | -        | -        | 1         |
| 3             | Kepala Bidang     | -                      | 2         | -        | -        | -        | -        | 2         |
| 4             | Kepala Sub Bidang | -                      | 4         | -        | -        | -        | -        | 4         |
| 5             | Kepala Sub Bagian | 1                      | 1         | -        | -        | -        | -        | 2         |
| 5             | Staf              | -                      | 2         | -        | 7        | -        | 1        | 10        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>1</b>               | <b>11</b> | <b>-</b> | <b>7</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>20</b> |

Sementara itu data pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 adalah seperti yang terdapat dalam tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai**  
**Tahun 2021**

| No  | Nama                         | Pendidikan | Jabatan                            | Pangkat / Gol.          |
|-----|------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL | S-1        | KEPALA BADAN                       | PEMBINA TK. I-IV/b      |
| 2.  | DRS.BENYAMIN HARUM           | S-1        | SEKRETARIS                         | PEMBINA Tk.I-IV/b       |
| 3.  | DRA. A. SASTRI H. NGAJANG    | S-1        | KABID DEMOKRATISASI                | PEMBINA-IV/a            |
| 4.  | DRS. PASKALIS B. LEBO        | S-1        | KABID PMA                          | PEMBINA-IV/a            |
| 5.  | MARIA YETSIANA WEA, M.Pd     | S-2        | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN       | PEMBINA-IV/a            |
| 6.  | ROBERTUS JEKARUS,ST          | S-1        | KASUBID HUB. ANTAR LEMBAGA & ORGAN | PENATA TK.I-III/d       |
| 7.  | FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS | S-1        | KASUBID POLITIK                    | PENATA III/c            |
| 8.  | LEONARDUS MANJE, SP          | S-1        | KASUBID PEMILU & PEMATAPAN WASBANG | PENATA III/c            |
| 9.  | ADELHEID SANUL               | SLTA       | KASUBAG KEUANGAN                   | PENATA III/c            |
| 10. | AGUSTIANY A. DJAE, SKM       | S-1        | KASUBAG PEP                        | PENATA III/c            |
| 11  | CORDINUS M.MAGUL,SH          | S-1        | STAF                               | PEMBINA-IV/a            |
| 12  | YOSEPH JEHADIN, SH           | S-1        | STAF                               | PENATA MUDA TK. I/III b |
| 13  | DONATUS JAMAN                | SLTA       | STAF                               | PENGATUR TK. I / II d   |
| 14  | RAIMUNDUS T. YARDI           | SLTA       | STAF                               | PENGATUR -II/c          |
| 15  | FERDINANDUS M. SEDA          | SLTA       | STAF                               | PENGATUR TK.I-II/d      |
| 16  | SIMON SU                     | SLTA       | STAF                               | PENGATUR TK.I-II/d      |
| 17  | WILIBRODUS SANI AGUNG        | SLTA       | STAF                               | PENGATUR -II/c          |
| 18  | VINSENSIUS PADU              | SLTA       | STAF                               | PENGATUR MUDA TK.I-II/b |
| 19  | SIPRIANUS GARUT              | SD         | STAF                               | JURU MUDA TK.I-I/b      |
| 20  | CHRISTOPHORUS HAMI           | SLTA       | STAF                               | THL                     |

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS**

**A. Rencana Strategi Tahun 2016-2021**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

1. Visi dan Penjelasan Makna Visi.

➤ VISI

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: “MASYARAKAT MANGGARAI YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN KEHIDUPAN BERPOLITIK YANG DEMOKRATIS”

2. Misi dan penjelasan makna tiap-tiap Misi

➤ MISI

Misi yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan situasi Keamanan yang Kondusif.
- b) Mewujudkan iklim politik yang demokratis.
- c) Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat .

3. Tujuan, Sasaran dan Program.

Tujuan, sasaran dan program tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM TAHUN 2021**

| Tujuan   | Sasaran   | Program   |
|--|---|---|
| 1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan Masyarakat. | 1. Meningkatnya komuni-kasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. | 1.1.1 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan                |
|  |   | 1.1.2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal     |
|  |   | 1.1.3 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |
| 2. Terciptanya kualitas                                      | 2.1 Meningkatnya kualitas   | 2.1.1 Pengembangan Wawasan  |

|   |  |            |                               |
|---|--|------------|-------------------------------|
| penyelenggaraan demokratis dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik. | penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik | Kebangsaan |                               |
|   |  | 2.1.       | Pendidikan Politik Masyarakat |
|   |  | 2          |                               |

## B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ada pada Lampiran.

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangserta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati dalam PK tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 saja, tetapi termasuk kinerja yang telah dicapai melalui program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Perjanjian Kinerja tahun 2021 juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dimaksud, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target               | Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran    |
|----|--|--|----------------------|---|-------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                    | 5   | 6           |
| 1  | Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan            | a. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya   | 12 kasus             | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  |             |
|    |  |  |                      | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   |             |
|    |  |  |                      | SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 327.730.000 |
|    |  | b. Jumlah pengamanan tertutup (PAMTUP)   | 30 Kali              | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  |             |
|    |  |  |                      | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   |             |
|    |  |  |                      | SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 327.730.000 |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelengaraan demokratisasi (PILPRES, PILKADA, PILEG) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik | c. Jumlah peserta sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran | 6 kali (600 Peserta) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  |             |
|    |  |  |                      | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  |             |
|    |  |  |                      | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 63,790,000  |

|  |  |  |           |  |             |
|--|--|--|-----------|--|-------------|
|  |  | masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa                      |           |  |             |
|  |  | d. Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM | 250 orang | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK   |             |
|  |  |  |           | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |             |
|  |  |  |           | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah               | 592.292.560 |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlukiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kejadiannya itu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja) Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan maka capaian dimaksud dibagi atas 5 (lima) kategori seperti berikut:

**TABEL 3.1**  
**KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

| No. | Capaian Kinerja | Kategori/ Makna |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1.  | $\geq 100$      | Memuaskan       |
| 2.  | $\geq 85 - 99$  | Sangat Baik     |
| 3.  | $\geq 70 - 84$  | Baik            |
| 4.  | $\geq 50 - 69$  | Cukup           |
| 5.  | $\leq 49$       | Kurang          |

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah **82,42%** dengan kategori “baik”.

**B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITASKINERJA**

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran–sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1** : Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran kinerja Tahun 2021 yang diperbandingan dengan pengukuran kinerja tahun 2016, tahun 2017, 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Analisis capaian indikator untuk sasaran pertama dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

| No.       | INDIKATOR SASARAN                    | Tahun 2016 |          |          | Tahun 2017 |          |          | Tahun 2018 |           |           | Tahun 2019 |           |           | Tahun 2020 |           |           | Tahun 2021 |           |           |
|-----------|--------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|           |                                      | T          | R        | %        | T          | R        | %        | T          | R         | %         | T          | R         | %         | T          | R         | %         | T          | R         | %         |
| <i>1</i>  | <i>2</i>                             | <i>3</i>   | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i>   | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i>   | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i>  | <i>13</i> | <i>14</i> | <i>15</i>  | <i>16</i> | <i>17</i> | <i>15</i>  | <i>16</i> | <i>17</i> |
| 1         | Kasus yang dimediasi penyelesaiannya | 12         | 18       | 150%     | 12         | 12       | 100%     | 12         | 14        | 116,66%   | 12         | 12        | 100%      | 12         | 11        | 91,67%    | 12         | 19        | 158,33%   |
| 2         | Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)  | 45         | 28       | 62%      | 33         | 30       | 90,90%   | 30         | 23        | 76,66%    | 30         | 36        | 120%      | 30         | 42        | 140%      | 30         | 48        | 160,00%   |
| Rata-rata |                                      |            |          | 106%     |            |          | 95,45%   |            |           | 96,66%    |            |           | 110%      |            |           | 115,84%   |            |           | 159,17%   |
| Kategori  |                                      |            |          |          |            |          |          |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | Memuaskan |           |

**Keterangan :**

T : Target

R : Realisasi

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 159,17% dengan kategori Memuaskan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 106% menjadi 95,45% pada tahun 2017; Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 (95,45%) pada tahun 2018 (96,66%) dan pada tahun 2019 sebesar 110%. Sementara itu pada tahun 2020 mencapai 115,84% dan juga dengan kategori memuaskan. Indikator pada sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

**a. Kasus yang dimediasi penyelesaiannya.**

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 159,17% dengan kategori Sangat baik. Selama tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menangani kasus dengan jumlah 19 kasus dari target 12 kasus tahun 2021. Adapun rincian laporan kegiatan mediasi penyelesaian masalah/ konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai seperti tertera pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3

**LAPORAN KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH / KONFLIK SOSIAL OLEH BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KAB. MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| <b>NO</b> | <b>TANGGAL</b>   | <b>PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL</b>   | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|------------------|--|--|
| 1         | 06 Januari 2021  | Penyelesaian masalah tanah Pustu Pau, Kec. Langke Rembong  | Selesai<br>Mimediiasi                                    |
| 2         | 14 Februari 2021 | Penyelesaian masalah kelangkaan pupuk terkait pemanggilan tuan Toko Tani an. Bapak Robert Junaedi sebagai distributor pupuk UREA Kaltim dan tuan toko Sejati an. Bapak Hendrik Kustionardi dari CV. Tani Mandiri yang menyediakan pupuk Ponska, ZA, SP36, PETROGAMI. Yang menjadi masalah adalah jenis pupuk NPK PONSKA stoknya selalu kurang karena kuota yang disiapkan pemerintah selalu sedikit. | Selesai<br>Penanganan dan tetap dalam pemantauan         |
| 3         | 15 Februari 2021 | Penyelesaian masalah terkait Ditemukannya sebuah Kapal yang mengangkut sapi ilegal antar pulau tanpa melalui pos karantina di Kedindi, Kec. Reok, yang akan dibawah ke NTB   | Selesai<br>Penanganan                                    |
| 4         | 23 Februari 2021 | Penyelesaian masalah tanah Jembatan Wae Kuli II, Desa Lemarang, Kec. Reok Barat  | Selesai dimediiasi                                       |
| 5         | 22 Februari 2021 | Penyelesaian masalah penyerobotan tanah oleh warga Desa Cambir Leca, an. Anton Taruk dan Petrus Ndali di Dusun Ramut, Desa Terong, Kec. Satar Mese Barat. Ctt : Kesbangpolda melakukan mediasi dilapangan sebanyak 5 (lima) kali   | Selesai<br>Penanganan dan tetap dalam pemantauan         |
| 6         | 10 Maret 2021    | Penyelesaian masalah tanah antar warga Gendang Nao dengan ahli waris dari Bapak Alm. Paulus Ntunu dan ahli waris dari Bapak Alm. Mateus Mbouk, di Lingko Mbelang, Desa Nao, Kec. Satar Mese Utara  | Selesai<br>Penanganan dan tetap dalam pemantauan         |
| 7         | 15 Maret 2021    | Penyelesaian masalah hama belalang dan ulat bulu yang menyerang tanaman jagung masyarakat Desa Terong, Kec. Satar Mese Barat. Luas areal yang di serang hama sebesar 70 Hektar dimana 60 Hektarnya merupakan program Gubernur NTT dan 10 Hektarnya adalah lahan masyarakat.Ctt : Kesbangpolda turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali  | Selesai<br>penangananya                                  |
| 8         | 17 Maret 2021    | Penyelesaian masalah persekutuan doa dari salah seorang pendeta di Wae Koe, Desa Legu, Kec. Satar Mese, dengan perantaraan saudara Eben Pareres (anggota Sat.Pol.PP Kabupaten Manggarai)   | Belum selesai<br>penangananya dan masih dalam pemantauan |
| 9         | 27 Maret 2021    | Penyelesaian masalah prokontra pengembangan listrik PLTU Ulumbu di Desa Lungar dan Desa Mocok, Kec.  | Selesai<br>penanganan dan                                |

|    |                        |  |   |
|----|------------------------|--|---|
|    |                        | Satar Mese, berupa pengeboran 11 (sebelas) Sumur Baru dengan kapasitas F6 Mega Watt. Ctt : Kesbangpolda melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali  | masih dalam pemantauan                        |
| 10 | 30 Maret 2021          | Penyelesaian masalah atas laporan masyarakat dari Desa Denge, Kec. Satar Mese Barat terkait adanya praktek Keagamaan / Ritual yang dipimpin oleh Bapak Sales Mon (seorang guru ASN) yang mengajar di SDK Lengos, Dusun Denge yang kegiatannya meresahkan masyarakat                            | Selesai penanganan dan masih dalam pemantauan |
| 11 | 08 April 2021          | Penyelesaian masalah pengelolaan dana APBDs dari Desa Benteng Tubi oleh Kepala Desa Purna Bhakti periode 2014 s/d 2019, yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Rapat penyelesaiannya bertempat di Ruang Ulumbu, Kantor Bupati Manggarai yang dipimpin oleh Asisten I Setda dan OPD terkait | Selesai Penanganan                            |
| 12 | 12 April 2021          | Penyelesaian Masalah tanah Lingko Tagol, Desa Cumbi , Kecamatan Ruteng. Antara Gendang Cumbi Mese dengan Gendang Wakat/ Niang Dupo.<br>Ctt. Kesbangpolda turun melakukan mediasi di lapangan sebanyak 4 ( empat) kali.   | Belum selesai masih dalam pemantauan          |
| 13 | 16 April 2021          | Penyelesaian masalah dari Aksi Damai Aliansi Masyarakat Bersuara (AMARA) di Kantor Desa Buar, Kec. Rahong Utara, atas keterlambatan pencairan BLT tahun anggaran 2021 transparansi pengelolaan Dana Desa   | Selesai Penanganan                            |
| 14 | 18 April 2021          | Penyelesaian Masalah OTT NARKOBA dengan inisial L.RT, di Karot, Kelurahan Tadong. Dalam kasus ini OTT Narkoba golongan B jenis Tembakau Gorila dengan berat 10, 46 gram. Kasusnya sudah di P21 dan segera disidangkan.   | Selesai penanganan                            |
| 15 | 10 Juni 2021           | Penyelesaian masalah tanah Sekolah SDN Romang, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat antara warga Kampung Kalo dan Maras dengan warga Kampung Mbang, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat  | Selesai Penanganan                            |
| 16 | 6 Juli 2021            | Penyelesaian Masalah tanah Lingko Tagol, Kecamatan Ruteng antara tua Gendang Dalo atas nama Kristoforus Kenan dan Rofinus Lapu. Masalah penggarapan tanah yang melewati batas dari Lingko Gendang Dalo   | Selesai dalam pemantauan                      |
| 17 | 4 s/d 6 September 2021 | Masalah penimbunan minyak tanah dan kelangkaan minyak tanah di Kab. Manggarai . kesbangpolda, Satuan Intekam Polres, Unit Intel Kodim 1612 Manggarai melakukan pemantauan dan konfirmasi dengan beberapa agen minyak tanah yang ada di kota Ruteng serta Berkoordinasi dengan PERTAMINA Reo.   | Sudah mediasi tetap dalam pemantauan          |
| 18 | 20 September           | Masalah tanah antara Gendang Lenggo Meda dengan  | Sudah mediasi                                 |

|    |                        |  |                        |
|----|------------------------|--|------------------------|
|    | 2021                   | Gendang Nampo, Desa Golo Woi, Kec. Cibai Barat.<br>Dengan melibatkan 8 (delapan) Lingko  | tetap dalam pemantauan |
| 19 | 27 s/d 28 Oktober 2021 | Masalah ERPAK di Kedindi, Reo, Kelurahan Wangkung, Kec. Reok antara saudara Nober Nabu, dkk dengan Pemkab Manggarai yang terjadi sudah lama dan sampai saat ini belum tuntas | Belum tuntas           |

**b. Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)**

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 160% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 140 %. Selama tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dengan jumlah 48 PAMTUP dari target 30 PAMTUP dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
**Pengamanan Tertutup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021**

| NO | URAIAN   |
|----|--|
| 1  | PAMTUP Tahun baru Masehi 2021,tanggal 01 Januari 2021  |
| 2  | PAMTUP Pemantauan situasi Kantrantibmas menjelang dan saat perayaan tahun baru imlek 1272 tanggal 11 s/12 februari 2021  |
| 3  | PAMTUP pelaksanaan kegiatan serah terima Jabatan dan Purna tugas Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021,tanggal 17 Februari 2021 di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai                         |
| 4  | PAMTUP kegiatan penjemputan dan peneriaan secara resmi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2021-2026 di Wae Reno Desa Ranaka,Kantor Bupati Manggarai 1 hari tanggal 28 Februari 2021 |
| 5  | PAMTUP Hari Raya Asra Miraj tahun 2021 tanggal 11 Maret 2021   |
|    | PAMTUP Hari Raya Nyepi tanggal 14 Maret 2021   |
| 6  | PAMTUP Misa Kamis Putih,tanggal 01 April 2021  |
| 7  | PAMTUP Misa Minggu Daun-Daun (Minggu Palma) tanggal 28 Maret 2021 di Wilayah Kec.Langke Rembong  |
| 8  | PAMTUP Misa Jumat Agung,Sabtu Suci dan Minggu Paska,tanggal 02 s/d 04 April 2021 di Wilayah Kec.Langke Rembong   |
| 9  | PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai,GMNI di Kapolres Manggarai tanggal 30 Maret 2021  |
| 10 | PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai dari Forum Masyarakat peduli Desa mata Wae Kec.Satar Mese Utara di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai,tanggal 15 April 2021                              |
| 11 | PAMTUP hari Buruh SE-Dunia yang di peringtkan setiap tanggal 01 Mei yang di pusatkan Kota Ruteng Kec.Langke Rembong tanggal 01 Mei 2021  |

|    |   |
|----|---|
| 12 | PAMTUP kegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai dari Aliansi Mahasiswa yang terhimpun dari Organisasi PMKRI,tanggal 03 Mei 2021   |
| 13 | PAMTUP Ibadah hari raya kenaikan Isah Almasih dan hari raya Idul Fitri 1442 H,di kota Ruteng Kec.Langke Rembong,tanggal 12 s/d 14 Mei 2021                      |
| 14 | PAMTUP kebakaran SPBU Mena,Kelurahan Bangka Tuke,Kec.Langke Rembong,tanggal 10 Mei 2021   |
| 15 | PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai dari Aliansi Manggarai Bergerak (MAGER) di Kec.Langke Rembong,tanggal 31 Mei 2021  |
| 16 | PAMTUP Peringatan Hari Kelahiran Pancasila,tanggal 01 Juni 2021   |
| 17 | PAMTUP Peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 di Wilayah Kec.angke Rembong,tanggal 26 Mei 2021   |
| 18 | PAMTUP Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Kec.Langke Rembong,tanggal 20 Juli 2021  |
| 19 | PAMTUP Hari Raya Tahun Baru 1443 Hijriyah,tanggal 11 Agustus 2021   |
| 20 | PAMTUP Hari Raya Proklamasih Kemerdekaan RI ke.76 diwilayah Kec.Langke Rembong,tanggal 16 s/d 17 Agustus 2021   |
| 21 | PAMTUP pelaksanaan ujian CPNSD Kab.Manggarai,tanggal 21 s/d 23 September 2021,di Kec.Langke Rembong   |
| 22 | PAMTUP Hari Raya Maulid Nabi Muhhamad Saw 1443 H,tanggal 20 Oktober 2021  |
| 23 | PAMTUP Harga Sembako sebagai akibat Covid 19,pada wilayah kecamatan Langke Rembong, tgl 16 s/d 18 September 2021  |
| 24 | PAMTUP Tabisan Imam Baru Keuskupan Ruteng,tgl 13 s/d 14 November 2021   |
| 25 | PAMTUP Ketersedian Sembako menjelang Natal 2021 dan tTahun Baru 2022,tanggal 2 s/d 4 November 2021  |
| 26 | PAMTUP menjelang pelantikan sumpah Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab.Manggarai selama 2 hari tanggal 19 s/d 20 November 2021                        |
| 27 | PAMTUP Perayaan Natal 2021 diwilyah Kecamatan Langke Rembong selama 4 hari dari tanggal 23 s/d 26 Desember 2021   |
| 28 | PAMTUP Perayaan Penutupan Tahun 2021 dan menjelang Tahun Baru 2022 diwilyah Kecamatan Langke Rembong selama 2 hari tanggal 30 s/d 31 Desember 2021              |
| 29 | PAMTUP Kegiatan Demo Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Manggarai dalam aksi seruan Moral memperingati Hari Ibu selama 1 Hari tanggal 22 Desember 2021 |

➤ Data Demonstrasi / aksi unjuk rasa tahun 2021

Pada Tahun 2021 ada beberapa aksi demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Adapaun data Demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2021 dapat dijelaskan pada table 3.5 berikut.

Tabel 3.5

LAPORAN DEMO/ AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN PAMTUP OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TA. 2021

| NO | TANGGAL          | PENANGANAN MASALAH DEMONSTRASI   | KET.               |
|----|------------------|--|--------------------|
| 1  | 30 Maret 2021    | Penanganan Demonstrasi GMNI Cabang Ruteng Di Polres Dan DPRD Manggarai tentang perbuatan asusila yang diduga oleh seorang anggota polisi Polres Manggarai  | Selesai dan tuntas |
| 2  | 15 April 2021    | Demonstrasi dari FORUM MASYRAKAT PEDULI DESA MATA WAE Kec. Satar Mese Utara di Kantor DPRD Manggarai dan Kantor BUPATI Manggarai tentang masalah benang tenus yang pengadaannya tidak sesuai keinginan masyarakat yang pengadaannya dilakukan oleh PLT. Kepala Desa Mata Wae . Demonstrasi ini di mediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD terkait        | Selesai dan tuntas |
| 3  | 16 April 2021    | Demonstrasi Aliansi Masyarakat Bersuara Desa Buar, Kec. Rahong Utara tentang keterlambatan pencairan BLT dan transparansi pengelolaan dana desa  | Selesai dan tuntas |
| 4  | 03 Mei 2021      | Demonstrasi memperingati Hari Buru yang dilakukan oleh PMKRI dan GMNI cabang Ruteng di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai. Demonstrasi ini dimediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD terkait  | Selesai dan tuntas |
| 5  | 31 Mei 2021      | Demonstrasi damai PMM (Pergerakan Masyarakat Manggarai) dari Reo. Sasaran Demonstrasi adalah Bupati Manggarai dan Kepala Dinas Sosial tentang dugaan penggelapan Dana Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Demonstrasi ini dimediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD Terkait  | Selesai dan tuntas |
| 6  | 22 Desember 2021 | Demonstrasi GMNI Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu, lokasi demonstrasi adalah:<br>a) Dinas PPO di mediasi oleh Kepala Dinas PPO<br>b) Kantor Bupati tidak ada mediasi<br>c) Polres Manggarai tidak ada mediasi<br>d) Kantor DPRD Manggarai di mediasi oleh anggota DPRD Manggarai an. Bapak Fabianus Abu dapil Wae Ri'i dan Rahong Utara dari Partai NASDEM | Selesai dan tuntas |

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 1 dengan target anggaran Rp. 327.730.000,- dan realisasinya Rp. 326.730.000,- (99,69% ).Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 1**  
**MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN DIALOG YANG KONSTRUKTIF ANTARA ANGGOTA**  
**MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DEMI MENJAGA**  
**PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

| INDIKATOR KINERJA                           | REALISASI 2021 | TARGET AKHIR RENSTRA | CAPAIAN          |
|---|----------------|----------------------|------------------|
| Jumlah Kasus yang dimediasi penyelesaiannya | 19             | 12                   | 158,33%          |
| Jumlah Pengamanan Tertutup                  | 48             | 30                   | 160%             |
| <b>Rata-Rata</b>                            |                |                      | 159,17%          |
| <b>Kategori</b>                             |                |                      | <b>MEMUASKAN</b> |

**2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1**

Adapun akuntabilitas sasaran I dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I**

| Sasaran/ Program/ Kegiatan  | Anggaran    | Realisasi   | %     |
|---|-------------|-------------|-------|
| Sasaran 1 :<br><i>Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</i>  | 327.730.000 | 326.730.000 | 99,69 |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  |             |             |       |
| KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   |             |             |       |
| SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 327.730.000 | 326.730.000 | 99,69 |

**Sasaran 2** : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaranwarga Negara dalamberpartisipasipolitik serta peningkatan kerukunan umat beragama maka dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 yang diperbandingan pengukuran kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis capaian kinerja indikator sasaran kedua dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

| No        | INDIKATOR SASARAN  | Tahun 2016    |           |       | Tahun 2017 |         |      | Tahun 2018 |        |        | Tahun 2019 |         |        | Tahun 2020 |    |    | Tahun 2021 |        |       |
|-----------|--|---------------|-----------|-------|------------|---------|------|------------|--------|--------|------------|---------|--------|------------|----|----|------------|--------|-------|
|           |  | T             | R         | %     | T          | R       | %    | T          | R      | %      | T          | R       | %      | T          | R  | %  | T          | R      | %     |
| 1         | 2  | 3             | 4         | 5     | 6          | 7       | 8    | 9          | 10     | 11     | 12         | 13      | 14     | 15         | 16 | 17 | 18         | 19     | 20    |
| 1.        | Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan | 1200 org      | 1.200 org | 100 % | 700 org    | 700 org | 100% | 600 org    | 472org | 78,66% | 600 org    | 150 org | 25%    | 600 org    | 0  | 0  | 600 org    | 20 org | 3,33% |
| 2.        | Jumlah peserta sosialisasi politik, Undang-Undang Politik dan HAM.   | 300 org       | 300 org   | 100 % | 200 org    | 200 org | 100% | 250 org    | 200    | 80%    | 250 org    | 50 org  | 20%    | 250 org    | 0  | 0  | 250 org    | 20 org | 8%    |
| Rata-rata |  |               |           | 100 % |            |         | 100% |            |        | 79,33% |            |         | 22,50% |            |    | 0  |            |        | 5,67% |
| Kategori  |  | <b>KURANG</b> |           |       |            |         |      |            |        |        |            |         |        |            |    |    |            |        |       |

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 5,67% dengan kategori **Kurang**. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mencapai target 100%, pada tahun 2018 sebesar 79,33 % dan pada tahun 2019 sebesar 22,50%. Akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 hanya sebesar 0%.

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 2 dengan target anggaran **Rp.656.082.560,-** dan realisasinya **Rp. 641.654.320,- (97,80%)**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 2  
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRATIS (PILPRES, PILKADA, PILEG) DAN  
KESADARAN WARGA NEGARA DALAM BERPARTISIPASI POLITIK**

| INDIKATOR KINERJA  | REALISASI 2021 | TARGET AKHIR RENSTRA | CAPAIAN       |
|--|----------------|----------------------|---------------|
| Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan | 20 Orang       | 600 Orang            | 3,33 %        |
| Jumlah peserta sosialisasi politik/ penyuluhan, Undang-Undang Politik dan HAM  | 20 Orang       | 250 Orang            | 8 %           |
| Rata-Rata  |                |                      | 5,67%         |
| <b>Kategori</b>  |                |                      | <b>KURANG</b> |

**2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2**

Adapun akuntabilitas sasaran 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut ini :

**Tabel 3.10**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 2**

| Sasaran/Program/Kegiatan  | Anggaran    | Realisasi   | %     |
|---|-------------|-------------|-------|
| <b>Sasaran2 :</b><br><i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan kesadaranwarga negara dalam berpartisipasi politik</i>   | 656.082.560 | 641.654.320 | 97,80 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  |             |             |       |
| Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  |             |             |       |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 63,790,000  | 63,790,000  | 100 % |

|  |             |             |       |
|--|-------------|-------------|-------|
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK   |             |             |       |
| Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |             |             |       |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah               | 592.292.560 | 577.864.320 | 97,56 |

Dari Kedua sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Total capaian dari kedua indikator sasaran adalah **82,42%** dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**TOTAL HASIL PENGUKURAN KINERJA**

| No              | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target               | Realisasi | %                |
|-----------------|--|---|----------------------|-----------|------------------|
| 1               | Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan          | 1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya  | 12 kasus             | 19 kasus  | 158,33%          |
|                 |  | 1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)  | 48                   | 30        | 160%             |
| Rata-Rata       |  |   |                      |           | 159,17 %         |
| Kategori        |  |   |                      |           | <b>MEMUASKAN</b> |
| 2               | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PiLKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik | 2.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa | 6 Kali (600 Peserta) | 20 orang  | 3,33%            |
|                 |  | 2.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM   | 250 orang            | 20 orang  | 8 %              |
| Rata-Rata       |  |   |                      |           | 5,67%            |
| Kategori        |  |   |                      |           | Kurang           |
| <b>Total</b>    |  |   |                      |           | <b>82,42%</b>    |
| <b>Kategori</b> |  |   |                      |           | <b>BAIK</b>      |

### C. REALISASI ANGGARAN

#### 1. Target dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Target dan realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12

#### TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TA. 2021

| Belanja         | Pagu Anggaran | Realisasi     | Capaian |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| Belanja Operasi | 3.231.096.147 | 3.087.856.798 | 95,57   |
| Belanja Modal   | -             | -             | 0.0     |
| Total           | 3.231.096.147 | 3.087.856.798 | 95,57   |

#### 2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13

#### TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TA. 2021

| Sasaran Strategis  | Pagu Anggaran      | Realisasi          | Capaian      |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruksi antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan           | 327.730.000        | 326.730.000        | 99,69        |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik | 656.082.560        | 641.654.320        | 97,80        |
| <b>Total</b>   | <b>983.812.560</b> | <b>968.384.320</b> | <b>98,43</b> |

#### 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja. Adapun Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14**  
**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TA. 2021**

| Sasaran Strategis  | % rata-rata capaian kinerja sasaran | Pagu Anggaran | Realisasi   | % realisasi anggaran | Ket.                 |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan          | 159,17                              | 327.730.000   | 326.730.000 | 99,69                | Efisien              |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik | 5,67                                | 656.082.560   | 641.654.320 | 97,80                | Tidak efisien        |
| <b>Rata-rata</b>   | 82,42                               | 983.812.560   | 968.384.320 | 98,43                | <b>Tidak efisien</b> |

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran 82,42 % ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 98,43 %, menunjukkan adanya *ketidakefisienan* penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* kegiatan dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan perubahan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Substansi Perubahan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan hanya mengenai perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran sedangkan target kinerja tetap mengikuti target yang termuat dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai 2016-2021.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraimerupakan tindaklanjut atau respon terhadap Permenpan Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraipada tahun 2021 menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapaisesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.Dua sasaran tersebut adalah Sasaran 1 yakni meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Sasaran 2 yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran I Program Kegiatan Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 159,17% dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Program Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 5,67 % dengan kategori “kurang”. Total rata-rata kedua sasaran tersebut adalah 82,42 % dengan kategori ‘baik’.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraiini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLINS BANGGARANG, S.Fil**  
Pembina TIK & PV/b  
NIP. 196809032000121004

**MATRIKS RENCANA STRATEGIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 - 2021**

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
 Visi : Masyarakat Manggarai yang Tertib, Aman, Damai dan Kehidupan Berpolitik yang Demokratis  
 Misi : 1. Mewujudkan situasi keamanan yang kondusif  
 2. Mewujudkan Iklim Politik yang demokratis  
 3. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat

| Tujuan  | Sasaran   |   | Target                   |                       |                       |                       |                       |                       | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran   |  | Penanggungjawab   |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---|
|   | Uraian  | Indikator Kinerja   | 2016                     | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | Kebijakan  | Program  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                        | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10   | 5  | 6   |
| 1.1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                                  | 1.1.1. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan           | 1.1.1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya<br>1.1.1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)<br>1.1.1.3. Jumlah kegiatan sosilaisasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)                           | 12 kasus                 | 12 kasus              | 12 kasus              | 12 kasus              | 12 kasus              | 12 kasus              | Kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, satuan perlindungan masyarakat dalam melakukan pengamanan dilokasi konflik dan pelaksanaan Pemilu   | 1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik                              |
| 2.1. Terciptanya kualitas penyelenggaraan demokrasi dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik | 2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik | 2.1.1.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 12 kali<br>1.200 Peserta | 7 kali<br>700 Peserta | 6 kali<br>600 Peserta | 6 kali<br>600 Peserta | 6 kali<br>600 Peserta | 6 kali<br>600 Peserta | 1. Memberikan informasi permasalahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan<br>2. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Penguatan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK) | 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN<br>2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN   | Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama |
|   |   | 2.1.1.2. Jumlah peserta sosilaisasi Undang-undang Politik dan Ha-hak Asasi Manusia (HAM)  | 300 orang                | 200 orang             | 250 orang             | 250 orang             | 250 orang             | 250 orang             | 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat<br><br>2. Pembinaan terhadap organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)   | 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK<br>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan                       |



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21 281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO.  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                             |
|--|--|---|------------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                  |
| 1.   | Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan          | 1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya<br>1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)  | 12 kasus<br>30 kali                |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik | 2.1. Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa<br>2.2. Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM | 6 Kali<br>600 Peserta<br>250 Orang |
| PROGRAM/KEGIATAN   |  | ANGGARAN (Rp.)  | KETERANGAN                         |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |  | Rp 944,695,000  | DAU APBD II                        |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   |  | Rp 63,790,000   | DAU APBD II                        |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   |  | 0   | -                                  |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |  | Rp 607,227,560  | DAU APBD II                        |
| <b>Jumlah</b>  |  | <b>Rp 1,615,712,560</b>   |                                    |

Ruteng, 23 November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
BUPATI MANGGARAI  
HERY BERTUS G. I. NAFIT, SE, MA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,  
  
GONDOLINS MANGGARANG, S.Fil  
Pembina T. 3. 1/7b  
NIP. 196809052000121004



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21 281 - Ruteng*

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai  
:  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, M.A**  
Jabatan : Bupati Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.Fil**

Pembina TKK/IV/b

NIP. 196809032000121004

Pihak Kedua,



**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA**





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

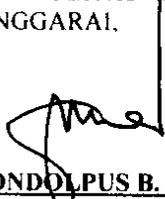
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI.

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

  
**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **MARIA YETSIANA WEA, M.Pd.**  
NIP : 196709051997022003  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031

**PIHAK PERTAMA,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,**

**MARIA YETSIANA WEA, M.Pd.**  
NIP. 196709051997022003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **AGUSTIANY ALFIRA DJAE, SKM**  
NIP : 19880816 201101 2 014  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**SEKRETARIS BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031

**PIHAK PERTAMA,**  
**KASUBAG PROGRAM ANGGARAN DAN**  
**KEUANGAN BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**AGUSTIANY ALFIRA DJAE, SKM**  
NIP. 19880816 201101 2 014



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP : 19690817 199903 2 007  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN**  
**MANGGARAI,**

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP.196809032000121004**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,**  
**WAWASAN KEBANGSAAN &**  
**KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA, AGAMA BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
**NIP. 19690817 199903 2 007**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

PERJANJIAN KINERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET    |
|--|--|-----------|
| Pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat | Terbentuknya FKUB Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kerukunan Hidup Beragama | 146 orang |
|  | Terbentuknya FPK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kehidupan Solider di Tengah Masyarakat                  | 344 orang |
|  | Terbentuknya Pokja PPWK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Wasbang                | 220 orang |

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI,  
WAWASAN KEBANGSAAN &  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
BUDAYA, AGAMA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP : 19740415 200701 1 023  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP : 19690817 199903 2 007  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI,  
WAWASAN KEBANGSAAN &  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

**LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP. 19740415 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> |
|--|---|---------------|
| Pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat | Terbentuknya FPK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kehidupan Solider di Tengah Masyarakat   | 344 orang     |
|  | Terbentuknya Pokja PPWK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Wasbang | 220 orang     |

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,**  
**WAWASAN KEBANGSAAN &**  
**KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN**  
**WAWASAN KEBANGSAAN BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

**LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP. 19740415 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

---

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP : 197210232005011006  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,**

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

  
**ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP. 197210232005011006



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET         |
|--|--|----------------|
| Meningkatnya hubungan antar lembaga/organisasi | Terlaksananya Seminar/Talkshow Ormas dan LSM | 30 Ormas / LSM |

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

  
**ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP. 197210232005041006



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS**  
NIP : 19760402 201212 1 003  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG POI  
DALAM NEGERI BADAN KESA  
BANGSA DAN POLITIK DA  
KABUPATEN MANGGARAI,

**FRANSISKUS SAVERINUS ROS, S**  
NIP. 19760402 201212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                 |
|---|---|------------------------|
| Terwujudnya penyelenggaraan administrasi laporan keuangan Partai Politik    | Jumlah laporan administrasi keuangan parpol yang divalidasi | 11 Parpol              |
|   | Rapat koordinasi/konsultasi dengan partai politik           | 3 kali                 |
| Terwujudnya penyelenggaraan administrasi penyusunan databesa Partai Politik | Verifikasi administrasi Parpol                              | 1 dokumen (11 Parpol)  |
|   | Verifikasi faktual Partai Politik                           | 1 dokumen (11 Parpol)  |
|   | Penyuluhan kepada masyarakat                                | 1 kecamatan (50 orang) |
|   | Rapat koordinasi/konsultasi dengan partai politik           | 2 kali                 |

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG POLITIK  
DALAM NEGERI BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

**FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS**  
NIP. 19760402 201212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP : 19670517199401 1002  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

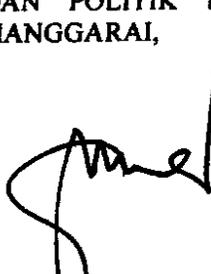
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

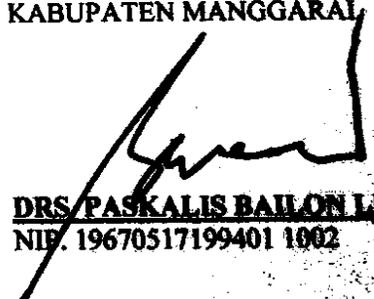
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN**  
**MANGGARAI,**

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP.196809032000121004**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**  
**NASIONAL DAN PENANGANAN**  
**KONFLIK BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
**NIP. 19670517199401 1002**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

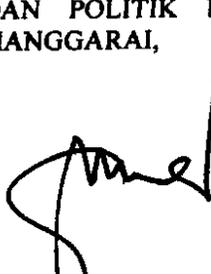
*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

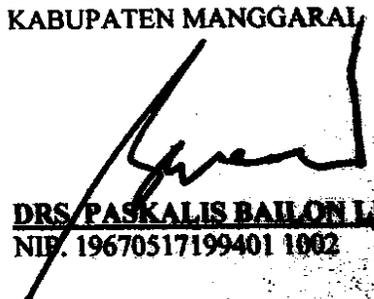
| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|---|---|-----------|
| Terwujudnya penyelesaian masalah aktual dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang efektif dan efisien | Jumlah kasus dalam bidang politik yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah kasus dalam bidang ekonomi yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah kasus dalam bidang sosial budaya yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)   | 30 kali   |
|   | Terwujudnya FKDM Kab. Manggarai sebagai wadah Deteksi Dini terhadap Gangguan Kantrabtimas di Masyarakat/Potensi Konflik | 135 orang |

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

  
**DRS/PASKALIS BAILON LERO**  
NIP. 19670517199401 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **ADELHEID SANUL**  
NIP : 196408131986032022  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP : 19670517199401 1002  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

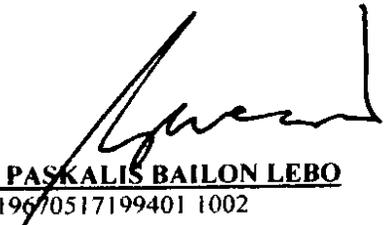
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP. 19670517199401 1002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEWASPADAAN DINI DAN  
KERJASAMA INTELIJEN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

  
**ADELHEID SANUL**  
NIP. 196408131986032022



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

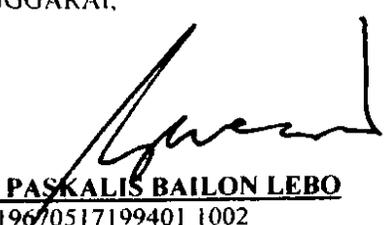
*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|---|---|-----------|
| Terwujudnya penyelesaian masalah aktual dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang efektif dan efisien | Jumlah kasus dalam bidang politik yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah kasus dalam bidang ekonomi yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah kasus dalam bidang sosial budaya yang dimediasi penyelesaiannya  | 4 kasus   |
|   | Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)   | 30 kali   |
|   | Terwujudnya FKDM Kab. Manggarai sebagai wadah Deteksi Dini terhadap Gangguan Kantrabtimas di Masyarakat/Potensi Konflik | 135 orang |

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP. 196705171994011002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEWASPADAAN DINI DAN  
KERJASAMA INTELIJEN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

  
**ADELHEID SANUL**  
NIP. 196408131986032022

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

| NO                             | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | TARGET | REALISASI | %                |               |
|--------------------------------|--|-------------------|--|--------|-----------|------------------|---------------|
| 1                              | 2  | 3                 | 4  | 5      | 6         | 7                |               |
| 1                              | Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan          | 1.1               | Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya  | Kasus  | 12 kasus  | 19 kasus         | 158.33        |
|                                |  | 1.2               | Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)  | Kali   | 30 kali   | 48 kali          | 160.00        |
|                                | <b>Rata-rata Sasaran 1</b>   |                   |  |        |           |                  | <b>159.17</b> |
| <b>Predikat</b>                |  |                   |  |        |           | <b>Memuaskan</b> |               |
| 2                              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik | 2.1               | Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa | orang  | 600 orang | 20 orang         | 3.33          |
|                                |  | 2.2               | Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM   | orang  | 250 orang | 20 orang         | 8             |
|                                | <b>Rata-rata Sasaran 2</b>   |                   |  |        |           |                  | <b>5.67</b>   |
| <b>Predikat</b>                |  |                   |  |        |           | <b>Kurang</b>    |               |
| <b>Rata-rata Sasaran 1 + 2</b> |  |                   |  |        |           | <b>82.42%</b>    |               |
| <b>Predikat</b>                |  |                   |  |        |           | <b>baik</b>      |               |

| NO           | PROGRAM  | ANGGARAN (Rp)      | KET         | REALISASI          | %            |
|--------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 1            | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 327,730,000        | APBD        | 326,730,000        | 99.69        |
| 2            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | 63,790,000         | APBD        | 63,790,000         | 100.00       |
| 3            | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 592,292,560        | APBD        | 577,864,320        | 97.56        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>983,812,560</b> | <b>APBD</b> | <b>968,384,320</b> | <b>98.43</b> |

Ruteng, 4 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GOMBOLUS BANGGARANG, S.Pd**

Pembina P. 03/2016

NIP. 196809032000121004